



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-465/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terarah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menyusun Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Kota Balikpapan tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Propemperkada Kota Balikpapan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Propemperkada Kota Balikpapan Tahun 2026 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam keadaan tertentu, Perangkat Daerah dapat mengajukan rancangan Peraturan Kepala Daerah diluar Propemperkada karena alasan:
a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam;
b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Kepala Daerah; dan
d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperkada ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 188.45-465/2025
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA
DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2026

NO	JUDUL	STATUS		PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
		BARU	PENYEMPURNAAN	
1	PERATURAN PERLAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI	√		DPMPSTP
2	PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) BERIMAN BALIKPAPAN	√		RSUD BERIMAN
3	PENGADAAN BARANG DAN JASA RSUD BERIMAN BALIKPAPAN	√		RSUD BERIMAN
4	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH		√	RSUD BERIMAN
5	TARIF LAYANAN	√		RSUD BERIMAN
6	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027	√		BAPPEDA LITBANG
7	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026		√	BAPPEDA LITBANG
8	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027	√		BAPPEDA LITBANG
9	RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029	√		BAPPEDA LITBANG
10	PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	√		BAPPEDA LITBANG
11	PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	√		BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
12	PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	√		SEKRETARIAT DPRD
13	POS PELAYANAN TERPADU	√		DP3AKB
14	MEKANISME PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK	√		DP3AKB

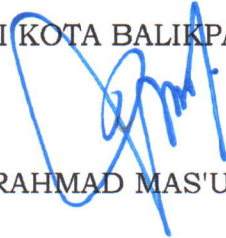
NO	JUDUL	STATUS		PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
		BARU	PENYEMPURNAAN	
15	KELOMPOK KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	v		DP3AKB
16	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG MEKANISME PENGADAAN PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH		v	DP3
17	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA	v		DLH
18	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	v		DPU
19	POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	v		DINKES
20	PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA OLAHRAGAWAN, PEMBINA OLAH RAGA, TENAGA KEOLAHRAGAAN DAN ORGANISASI OLAH RAGA	v		DPOP
21	DESAIN BESAR OLAHRAGA NASIONAL	v		DPOP
22	PUSAT PENDIDIKAN PELATIHAN LATIHAN PELAJAR DAERAH/SEKOLAH KEOLAHRAGAAN	v		DPOP
23	PENATAAN, PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR	v		DISHUB
24	PEDOMAN SITEPLAN	v		DISPERKIM
25	PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN	v		INSPEKTORAT
26	PEDOMAN PENUGASAN INVESTIGASI	v		INSPEKTORAT
27	PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO	v		INSPEKTORAT
28	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 14 TAHUN 20245 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PADA BIDANG PENDIDIKAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		v	DISDIKBUD

NO	JUDUL	STATUS		PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
		BARU	PENYEMPURNAAN	
29	PENERIMAAN MURID BARU KOTA BALIKPAPAN	√		DISDIKBUD
30	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH		√	DISDIKBUD
31	PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	√		DISDIKBUD
32	KONTRAK KERJA INDIVIDU	√		DISDIKBUD
33	INSENTIF DAN DISINSENTIF	√		DPPR
34	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG GARIS SEMPADAN	√		DPPR
35	PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	√		DISPUSTAKAR
36	PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	√		DISPUSTAKAR
37	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA	√		BPBD
38	RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025-2029	√		BPBD
39	RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR	√		BPBD
40	TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	√		BKAD
41	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026		√	BKAD
42	STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	√		BKAD

NO	JUDUL	STATUS		PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
		BARU	PENYEMPURNAAN	
43	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	√		BKAD
44	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	√		BKAD
45	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA		√	BKAD
46	SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI (CORPORATE UNIVERSITY) DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	√		BKPSDM
47	SISTEM KERJA	√		BKPSDM
48	POLA KARIER	√		BKPSDM
49	TATA CARA PENGHITUNGAN POTENSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	√		BPPDRD
50	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	√		BPPDRD
51	PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI	√		BPPDRD
52	PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINSITRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA BALIKPAPAN	√		BAGIAN PEMERINTAHAN
53	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH		√	BAGIAN ORGANISASI
54	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN		√	BAGIAN ORGANISASI
55	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BALIKPAPAN		√	BAGIAN ORGANISASI

NO	JUDUL	STATUS		PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
		BARU	PENYEMPURNAAN	
56	PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN	v		BAGIAN ORGANISASI
57	PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN	v		BAGIAN ORGANISASI
58	PEDOMAN PROGRAM BEASISWA STIMULAN PENDIDIKAN TINGGI	v		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
59	PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM	v		BAGIAN HUKUM

WALI KOTA BALIKPAPAN,



RAHMAD MAS'UD